

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran serta buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia kabupaten Bekasi melakukan gerakan dan gagasan besar untuk menjadikan buruh sebagai penentu dalam sebuah kebijakan yang menguntungkan kaum buruh, melakukan jejak pendapat kepada partai politik yang memiliki visi misi yang sejalan dengan kepentingan kaum buruh, untuk menitipkan orang-orang pilihan rekomendasi organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia untuk menjadi calon anggota legislatif di tahun politik 2014 dan mengkonsolidasikan seluruh anggota organisasi untuk memilih calon anggota legislatif yang di rekomendasikan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
2. Pemilu legislatif 9 April 2014 menjadi sejarah baru bagi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berkat kerja keras semua anggota organisasi berhasil mengantarkan 2 orang kadernya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bekasi periode 2014-2019, dengan adanya perwakilan buruh yang menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah mampu memberikan perubahan dengan Fungsi pengawasan yang di lakukan oleh dewan perwakilan daerah terkait masalah ketenagakerjaan menjadi kunci sukses dalam meningkatkan kesejahteraan kaum buruh serta mampu memdorong terbentuknya suatu aturan atau kebijakan yang melindungi hak para kaum buruh. Di sahkanya Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan adalah hasil dari implementasi kinerja perwakilan buruh dalam politik dan menyakinkan seluruh organisasi bahwa buruh mampu berperan sebagai penentu kebijakan.

5.2 Saran

1. Diharapkan peran buruh dan wakil buruh yang menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bekasi lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap aturan pelaksana terkait masalah masalah ketenagakerjaan, sosial dan kesehatan dengan mendorong lembaga dinas terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap aturan yang berlaku di daerah

kabupaten Bekasi agar tidak ada pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan.

2. Buruh diharapkan lebih konsisten dan menjaga eksistensi peran buruh dalam dunia politik meskipun sudah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan melalui proses politik legislasi karena kebijakan perburuhan dapat berubah dengan memperhatikan keadaan dan kondisi yang ada.

